

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pemberian status istimewa ISA kepada negara-negara kawasan Afrika dalam pertambahan dasar laut internasional didorong oleh adanya pembentukan *knowledge* bersama dan adanya dominasi *productive power*. Pertama, tercapainya pembentukan *knowledge* bersama yang berkaitan dengan kesepakatan diberlakukannya prinsip *common heritage of mankind* sebagai landasan berjalannya rezim ISA. Dalam hal ini, *knowledge* berupa gagasan *common heritage of mankind* sebagai faktor kausal dasar pada akhirnya membentuk status istimewa yang dimiliki oleh negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kawasan Afrika melalui rezim ISA. Pembentukan *knowledge* bersama ini kian berjalan seiring dengan perumusan rezim dasar laut internasional pada sesi ke-22 Majelis Umum PBB yang berperan sebagai sarana sosialisasi atau distribusi gagasan *common heritage of mankind* kepada aktor-aktor yang terlibat. Kesimpulan dari faktor ini adalah bahwa melalui pembentukan *knowledge* berupa *common heritage of mankind* yang kemudian menjadi preferensi bersama para aktor sebagai landasan ISA, segala prosedur pertambahan dasar laut internasional disepakati harus diprioritaskan kepada negara-negara berkembang, termasuk negara-negara kawasan Afrika guna mencegah monopoli oleh negara-negara berteknologi maju dan guna mendorong keterlibatan serta pembangunan negara-negara tersebut. Keistimewaan negara-

negara kawasan Afrika ditunjukkan melalui berbagai inisiatif dan komitmen ISA yang dijalankan guna mendorong keterlibatan serta pembangunan ekonomi bagi negara-negara Afrika melalui pertambangan dasar laut internasional. Implementasi dalam hal ini yaitu berupa upaya ISA yang mengusung Proyek *African Deep Seabed Resources* (ADSR) serta menggagas kerja sama dengan UNECA.

Kedua, adanya dominasi *productive power* yang dimiliki oleh negara-negara Afrika yang terbangun seiring dengan pembentukan rezim. Pengalaman kolonialisme, upaya mencapai kemandirian ekonomi, serta mewujudkan pergeseran kekuatan politik dalam rezim hukum laut menjadi pendorong utama bergabungnya negara-negara Afrika dalam proses pembentukan ISA sebagai rezim dasar laut internasional. Dengan adanya visi dan misi bersama yang sejalan, tekad negara-negara kawasan Afrika makin kuat untuk membentuk *power* yang mendominasi seiring dengan proses pembentukan rezim dasar laut. ISA sebagai rezim dasar laut telah menjadi titik balik terciptanya tata kelola hukum laut internasional baru yang diperjuangkan dan diwujudkan oleh negara-negara berkembang, khususnya Afrika. Hukum laut lama dianggap merupakan hukum yang bersifat Eurosentris dan hanya membawa kepentingan bagi negara-negara Barat. Hal ini dapat tecermin melalui makin banyaknya jumlah negara Afrika yang berpartisipasi dalam perjalanan pembentukan rezim dan menjadi sangat berpengaruh. Dengan *productive power* dalam rezim, negara-negara Afrika berhasil memegang kendali kepemimpinan dan menghimpun kesamaan visi dari negara-negara berkembang lain, khususnya melalui peran Engo, wakil Afrika yang

memimpin segala perumusan aturan dasar laut internasional serta melalui koalisi kelompok 77 (G-77) dan negara-negara Asia serta Amerika Latin guna melakukan tekanan kepada negara-negara maju serta menyerukan prioritas kepentingan bagi negara-negara berkembang dalam pertambangan dasar laut. Tekanan dalam jumlah besar ini mempengaruhi pengambilan keputusan yang pada akhirnya menghasilkan resolusi pembentukan komite tetap dasar laut yang disponsori oleh 10 negara Afrika. Absennya dominasi *power* dari mayoritas negara-negara Barat dalam perumusan ISA akibat adanya perbedaan kepentingan juga turut memperkuat posisi negara-negara Afrika untuk berpengaruh besar dan memegang kepemimpinan dalam setiap keputusan pembentukan rezim. Hal ini menyimpulkan bahwa adanya *productive power* inilah yang menjadi faktor keputusan-keputusan dalam pembentukan rezim cenderung sejalan dengan kepentingan negara-negara Afrika sebagai aktor yang banyak mendominasi dan memegang kepemimpinan dalam perjalanan rezim ISA.

4.2. Saran Penelitian

Penelitian ini telah memberikan jawaban atas rumusan masalah terkait mengapa ISA memberikan status istimewa kepada negara-negara kawasan Afrika dalam pertambangan dasar laut internasional. Analisis teori rezim internasional berbasis *knowledge* dan *productive power* menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian status istimewa ISA kepada negara-negara Afrika tersebut. Berkaitan dengan hal ini, hipotesis penelitian yang diajukan juga telah menghasilkan temuan

teoritis yang sesuai. Namun demikian, penelitian ini juga mempunyai saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Untuk menggali lebih lanjut penelitian yang tidak hanya berfokus dalam mengulik pemberian status istimewa ISA kepada negara-negara Afrika, penelitian selanjutnya dapat menganalisis implikasi keterlibatan nyata negara-negara Afrika dalam pertambangan dasar laut internasional melalui ISA. Peneliti selanjutnya dapat menggali apakah status istimewa yang dimiliki oleh negara-negara Afrika sungguh-sungguh memberikan keleluasaan bagi Afrika untuk berpartisipasi dalam pertambangan dasar laut internasional serta apakah Afrika dapat memanfaatkan serta memaksimalkan keistimewaan yang telah dimiliki tersebut dalam aktivitas pertambangan dasar laut internasional yang ada.